

**ANALISIS DAMPAK PENGGUNAAN AMANDEMEN PSAK
216 DAN KESESUAIAN PENERAPAN AKUNTANSI ASET
TETAP TERHADAP PSAK 216 PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA I (PERSERO) DAN PT. ALKINDO NARATAMA
TBK. TAHUN 2022 - 2023**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**

**Oleh :
Erika Dwi Rahmawati
NPM. 22101082002**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAKSI

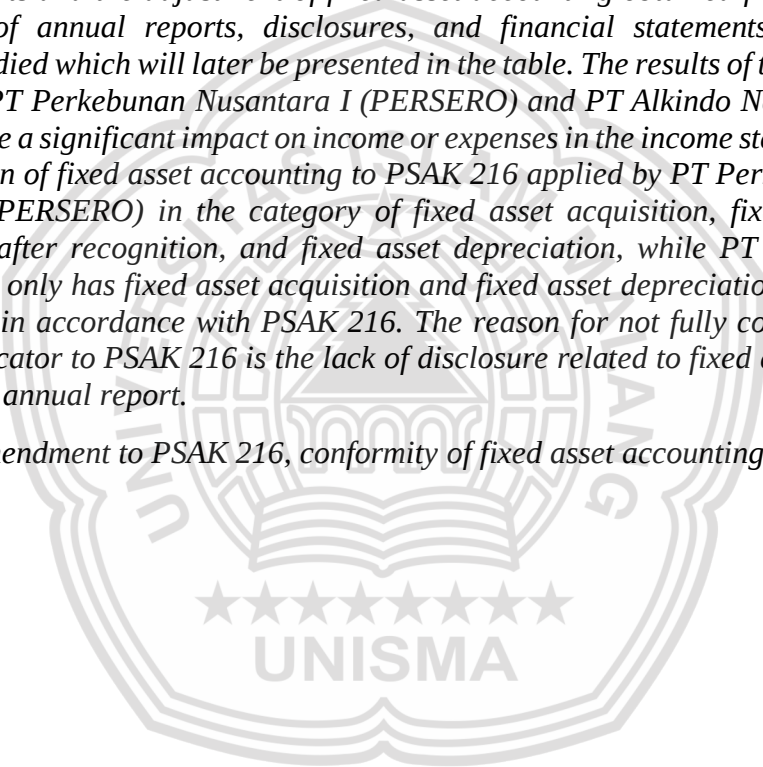
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan amandemen PSAK 216 dan suaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif komparatif, karena selaras dengan penelitian ini, yakni menganalisis makna, membandingkan, dan pemahaman penggunaan amandemen PSAK 216 yang diterapkan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis isi atau konten (*Content Analysis*) mengidentifikasi dan mengkategorikan data terkait dampak amandemen PSAK 216 dan kesesuaian akuntansi aset tetap yang didapatkan dari data berupa annual report, disclosure, dan laporan keuangan perusahaan yang diteliti yang nantinya akan disajikan pada tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan maupun beban pada laporan laba rugi. Penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 yang diterapkan oleh PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) pada kategori perolehan aset tetap, pengukuran aset tetap setelah pengakuan, dan penyusutan aset tetap, sedangkan PT Alkindo Naratama Tbk hanya perolehan aset tetap dan penyusutan aset tetap saja yang penerapannya sesuai dengan PSAK 216. Penyebab tidak sepenuhnya sesuai masing-masing indikator terhadap PSAK 216, sebab kurangnya pengungkapan terkait aset tetap pada annual report perusahaan.

Kata Kunci: Amandemen PSAK 216, kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the impact of the implementation of PSAK 216 amendments and the adjustment of the application of fixed asset accounting to PSAK 216 of PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) and PT Alkindo Naratama Tbk. This type of research is a comparative descriptive qualitative research, because it is in line with this research, namely analyzing the meaning, comparing, and understanding the use of PSAK 216 amendments applied by PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) and PT Alkindo Naratama Tbk. The data source for this study uses secondary data using the content analysis method (Content Analysis) to identify and categorize data related to the impact of PSAK 216 amendments and the adjustment of fixed asset accounting obtained from data in the form of annual reports, disclosures, and financial statements of the companies studied which will later be presented in the table. The results of the study indicate that PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) and PT Alkindo Naratama Tbk do not have a significant impact on income or expenses in the income statement. The application of fixed asset accounting to PSAK 216 applied by PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) in the category of fixed asset acquisition, fixed asset measurement after recognition, and fixed asset depreciation, while PT Alkindo Naratama Tbk only has fixed asset acquisition and fixed asset depreciation whose application is in accordance with PSAK 216. The reason for not fully complying with each indicator to PSAK 216 is the lack of disclosure related to fixed assets in the company's annual report.

Keywords: Amendment to PSAK 216, conformity of fixed asset accounting application



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi memiliki peranan yang penting ketika menjalankan bisnis, sebab digunakan untuk menyediakan informasi kinerja keuangan perusahaan dan membantu pemangku kepentingan internal maupun eksternal saat membuat keputusan. Dengan demikian tingkat keefisienan sistem informasi akuntansi sangat dibutuhkan. Salah satu kewajiban suatu emiten yang sahamnya sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan (*financial statement*) setiap tiga bulan sekali dan annual report secara relevan dan rinci. Salah satu standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) yang digunakan sebagai pedoman seorang akuntan di Indonesia saat menyusun hingga menyajikan laporan keuangan suatu entitas, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Azizah., 2024).

Sebagai pelaku bisnis tidak bisa menghindari untuk tidak memahami pelaporan kinerja keuangan, karena perusahaan harus mampu mempublikasikan kondisi perusahaan sebenar-benarnya dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian dan distorsi informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak berkepentingan saat menelaah informasi laporan keuangan guna memperkirakan masa depan ekonomi. Laporan keuangan merupakan salah satu

dokumen penting perusahaan yang harus dimiliki perusahaan agar dengan mudah mendeteksi kinerja keuangan perusahaan. Penjelasan terkait laporan keuangan yang diungkapkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 201 paragraf 09 yakni sebuah penyajian terstruktur mulai dari posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan perusahaan terdiri atas laporan posisi keuangan (neraca), laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Shafa et al., 2024).

Salah satu komponen laporan keuangan, yakni laporan posisi keuangan atau sering disebut dengan neraca. Neraca memuat terkait aktiva dan pasiva sebuah perusahaan, dalam sisi aktiva terdapat akun aset tetap (Theressa et al., 2023). Aset tetap merupakan harta yang digunakan atau sewakan oleh perusahaan dalam bentuk fisik untuk jangka waktu yang lama sesuai dengan umur manfaatnya (Emir & Laeli., 2023). Aset tetap bersifat permanen yang didapatkan dari peristiwa pembelian, pembangunan, maupun sumbangan dari suatu pihak. Umumnya peran aset tetap menjadi kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan produksi dan usaha suatu perusahaan khususnya perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Oleh karena itu semestinya adanya pengecekan dan perawatan aset tetap secara terjadwal, guna meminimalisir penggunaan aset tetap yang melebihi umur aset dan mengetahui lebih cepat jika aset tetap mengalami penurunan fungsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah dana yang harus dikeluarkan untuk memfasilitasi perbaikan aset tetap terbilang sangat besar (Wibawani., 2024).

Mengingat aset tetap memiliki peran yang krusial dan besarnya dana yang dipergunakan dalam mendapatkan aset tetap maka dibutuhkan perlakuan akuntansi yang baik dan relevan terhadap aset tetap yang di miliki perusahaan (Theressa et al., 2023). Perusahaan harus memahami dengan benar untuk perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berupa perolehan, pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penyusutan, penghentian pengakuan, pengungkapan terkait aset tetap dengan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 216.

Demikian pula terdapat ketetapan baru oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) melakukan perubahan penomoran PSAK dilakukan untuk membedakan PSAK merujuk pada IFRS dengan PSAK yang tidak merujuk pada IFRS. Oleh karena itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) melakukan pengesahan amandemen PSAK 216 pada 24 februari 2021 dan penomoran PSAK 16 terkait aset tetap diganti penomoran sesuai amandemen PSAK yang berlaku efektif sejak 1 januari 2024 menjadi PSAK 216 terkait aset tetap, serta mengatur terkait hasil sebelum penggunaan yang diintensikan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan (IAI Global., 2022). Demikian pula terdapat ketetapan baru terkait perubahan penomoran dari PSAK 216 menjadi PSAK 216 disahkan pada 12 Desember 2022 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 Perubahan penomoran tidak mempengaruhi substansi pengaturan di masing-masing PSAK dalam SAK Indonesia, selain itu pada ketentuan penomoran PSAK 2xx untuk PSAK yang merujuk pada IAS (IAI Global., 2022).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) melakukan pengesahan amandemen PSAK 16 pada 24 februari 2021. Amandemen PSAK 16 ini mulai berlaku efektif sejak 1 januari 2023 yang mengatur terkait hasil sebelum penggunaan yang diintensikan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023).

Perubahan amandemen PSAK 216 yang pertama ada pada paragraf 17(e) berupa penghapusan dan melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap hasil produk yang dihasilkan dari biaya pengujian Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023). Perubahan ketetapan adanya permasalahan berkaitan dengan keberagaman pelaporan hasil penjualan barang sebelum Aset Produksi dan Distribusi (APD) tersedia untuk digunakan. Berkaitan penjelasan diatas merujuk pada perbedaan penerapan pengakuan pendapatan dari hasil penjualan unit aset tetap yang sudah diproduksi dibandingkan dengan yang masih dalam proses (Ikatan Akuntan Indonesia., 2022). Maka dari itu pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk hasil pengujian harus diakui secara penuh sebagai pendapatan dalam laba rugi. Adapun contoh penerapan pada proses pengujian mesin pengemasan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar perusahaan. Produk yang gagal ini bisa dijual dengan harga diskon ke pengrajin.

Kedua, terdapat pada paragraf 20A berisikan pengakuan hasil penjualan *item* yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam laporan laba rugi, mengukur biaya perolehan entitas menerapkan persyaratan

pengukuran dalam PSAK 14: Persediaan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023). Arti dari “hasil penjualan item” yakni sampel atau produk yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Pengukuran persediaan pada PSAK 202 paragraf 09 merupakan persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya yang timbul terkait pengukuran persediaan sesuai PSAK 202 paragraf 10,11,12 yang terdiri dari biaya persediaan, biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain (Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023). Biaya perolehan meliputi aset tetap berupa tanah, bangunan, dan peralatan (Warfield., 2014).

Implikasi adanya amandemen PSAK 216 paragraf 17(e) memiliki kesinambungan dengan paragraf 20A, sebab adanya penghapusan peraturan terkait pengurangan hasil neto setiap produk yang dihasilkan dari biaya pengujian. Peraturan tersebut berdampak positif sebab perusahaan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan terkait hasil penjual item selama pengujian. Selain itu memungkinkan pemangku kepentingan memahami pos pendapatan dan biaya non operasional secara lebih jelas guna meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan kepada publik. Sebaliknya hasil amandemen PSAK 216 berdampak negatif pada pencatatan pendapatan dan biaya secara terpisah, terutama jika aktivitas pengujian menghasilkan banyak item, dan hasil penjualan aset tetap yang dihasilkan selama pengujian diakui sebagai pendapatan menimbulkan fluktuasi laba rugi jika nilai penjualan tersebut signifikan namun tidak berulang. Laporan laba rugi

menyajikan selisih antara pendapatan dan beban. Dengan demikian apabila nominal pendapatan lebih besar daripada beban maka selisihnya disebut laba neto, sebaliknya jika beban melebihi pendapatan maka selisihnya rugi neto (Warren et al., 2017).

Ketiga, adanya penambahan syarat dalam paragraf 74A(b) yang dapat dipahami bahwa pengungkapan hasil dan biaya perolehan atas *item* bukan merupakan *output* dari aktivitas normal dan pengungkapan berada di laporan laba rugi dan komprehensif lain (Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023). Sehingga berdampak pada perusahaan yang harus secara jelas pengungkapan laporan keuangan yang lebih transparan, *item* yang bukan merupakan *output* dari aktivitas normal mencakup pendapatan dari transaksi hasil penjualan produk sampingan berasal dari aktivitas operasi maka dilaporkan pada pendapatan dari aktivitas operasi, biaya pembukaan fasilitas baru, biaya iklan, biaya pelatihan staf, biaya administrasi dan biaya *overhead* umum lainnya.

Keempat, mengungkapkan terkait ketentuan transisi yang tertera pada paragraf 80D berisikan jika terdapat aset yang dalam atau pada saat awal periode amandemen terjadi tahapan pengujian atau sudah siap digunakan maka di retrospektif (Dewan Standar Akuntansi Keuangan., 2023). Entitas mengakui dampak kumulatif dari penerapan awal amandemen sebagai penyesuaian atas saldo laba awal pada awal periode sajian paling awal yakni Januari 2023, dan yang terakhir pada paragraf 81N terkait tanggal efektif amandemen PSAK 216 diberlakukan ke setiap perusahaan.

Kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap yang disebutkan dalam PSAK 216 meliputi tujuh komponen yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu perolehan aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap saat pengakuan, pengukuran aset tetap setelah pengakuan, penyusutan aset tetap, penghentian pengakuan aset tetap, penyajian dan pengungkapan. Meskipun penerapan akuntansi aset sudah dijelaskan sebelumnya menunjukkan sebagian perusahaan sesuai dengan PSAK 216, namun masih terdapat beberapa perusahaan yang belum sesuai dengan komponen yang semestinya (Wuisang et al., 2023).

Pengakuan aset tetap perusahaan diharapkan mendapatkan manfaat ekonomis dimasa depan yang diukur secara reliabel, dan masa manfaatnya lebih dari satu periode. Aset tetap dicatat harga perolehan sebagaimana mencatat biaya perolehan dikurangi akumulasi pengusutan dan akumulasi rugi penurunan (Bakri., 2020). Adapun penelitian terdahulu yakni Aprilia et al., (2023) pada PT Kaltim Kariangu Terminal sebagai tidak mengungkapkan jumlah komitmen kontraktual dalam memperoleh aset tetap dan jumlah kompensasi dari pihak ketiga pada catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran aset tetap saat pengakuan telah dijelaskan ketika perusahaan memperoleh aset tetap dapat mempengaruhi penentuan harga perolehan. Elemen biaya perolehan telah dijelaskan pada paragraf 16 dan 17 terkait biaya perolehan yang dapat diatribusikan secara langsung. Salah satu penerapan yang berbeda pada perusahaan sektor jasa konstruksi. Hasil penelitian Syah et al., (2023) pada PT Bumi Karsa salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa

kontruksi di Makassar menyatakan bahwa aset tetap pada laporan posisi keuangan sepenuhnya telah berpedoman sesuai dengan PSAK 216. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Putra et al., (2024) pada PT. Waskita Karya Pusat Jakarta yang bergerak pada bidang sama yakni konstruksi. Dimana perusahaan menerapkan harga perolehan aktiva tetap terkadang tidak terjadi keseragaman harga perolehan aktiva tetap, pihak manajemen perusahaan tidak pernah melakukan atau mengakui keseragaman harga perolehan aktiva.

Pengukuran aset tetap setelah pengakuan menerapkan kebijakan akuntansi kepada perusahaan dalam pemilihan dua metode pengukuran aset tetap yang menerapkan sesuai paragraf 30 model biaya dan paragraph 31 Model revaluasi. Salah satu cara yang digunakan CV Wijaya Kusuma Tulungagung dalam menerapkan amandemen PSAK 216 paragraf 17(e) dengan penilaian aset tetap dengan cara revaluasi, yaitu dihitung dengan nilai wajar. Penyusutan aset tetap telah dijelaskan pada PSAK 216 paragraf 48 yakni beban depresiasi untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Salah satu kasus yang terjadi pada penelitian, yakni dari Lodan et al., (2023) yang perhitungan beban penyusutan lebih besar sehingga berakibat pada akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap. Metode penyusutan yang dapat digunakan perusahaan yang terbagi menjadi tiga metode garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi.

Penghentian pengakuan aset tetap telah dijelaskan pada paragraf 67: yang menjelaskan jumlah tercatat aset tetap yang pengakuannya dihentikan ketika pelepasan dan tidak terdapat lagi masa ekonomis masa depan yang diharapkan

dari penggunaan atau pelepasan. Perusahaan mengungkapkan terkait pelepasan aset tetap dapat terjadi melalui berbagai cara contohnya dijual, rusak, disewakan, dan disumbangkan ke suatu entitas Adapun beberapa kasus penelitian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada penghentian pengakuan aset tetap, yakni dilakukan oleh Wijaya & Salesti., (2022) pada PT Graha Trisaka Industri tergolong salah satu perusahaan galangan kapal yang masa manfaatnya aktiva tetap sudah habis terkadang masih dipergunakan kembali, kecuali jika aktiva tetap tidak berfungsi dengan baik. Safi'i & Fahriani., (2023) terhadap PT Selecta yang bergerak pada bidang pariwisata ini terbukti tidak terdapat pencatatan, penghentian, dan penghapusan atas aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya sehingga berdampak pada neraca.

Penyajian dan pengungkapan telah dijelaskan pada amandemen PSAK 216 paragraf 74A mengungkapkan jika persyaratan pengungkapan atas hasil dan biaya perolehan yang bukan merupakan *output* dari aktivitas normal perusahaan dan pengungkapan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain mengungkapkan jumlah hasil dan biaya perolehan. Penyajian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan dalam posisi keuangan harus disajikan secara terpisah. Dengan menggunakan pemilihan metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan dalam aset tetap. Salah satu ketidaksesuaian penerapan akuntansi aset tetap ada pada beberapa kasus diperusahaan, yaitu hasil penelitian oleh S. E. Putri & K., (2022) pada BAPPEDA Provinsi Sumatera Utara menunjukkan sejumlah data yang tidak diungkapkan secara jelas di catatan laporan anggaran, tidak melakukan penjabaran premis estimasi

yang digunakan dalam penetapan jumlah bruto dan tidak mengungkapkan strategi penurunan aset yang digunakan. Peristiwa diatas Murdana et al., (2023) terhadap PT Buana Finance Tbk Cabang Manado yang memiliki fokus utama pada penyediaan sewa guna usaha serta jasa keuangan terhadap UMKM dan hasil penelitian Ayuningtyas., (2022) yang diterapkan PT. Blue Bird. Kedua perusahaan ini mengungkapkan dan membuktikan perlakuan aset tetap dilaporkan posisi keuangan sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 16.

PT Thiess Contractor Indonesia (TCI) menjadi salah satu perusahaan kontraktor dari PT Arutmin Indonesia Tambang Satui terjadi kasus penyalahgunaan aset yang dilakukan karyawan, yaitu menggunakan barang persediaan berupa 18 baterai (accu) dan besi bekas layak pakai untuk kepentingan sendiri (Winasti., 2017). Pemeriksaan yang dilakukan OJK kepada PT Hanson International, yang ditemukan manipulasi penyajian akuntansi terkait penjualan kavling siap bangun dengan nilai gross Rp 732 miliar, sehingga pendapatan perusahaan melonjak. Kegiatan jual beli tersebut, PT Hanson International melakukan pelanggaran akuntansi aktivitas real estat (PSAK 44).

PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) yang bergerak dibidang pengelolaan, pengolahan, dan pemasaran subsektor agribisnis dan agroindustri dengan memiliki aset tetap berupa aset tanaman produktif berupa kelapa sawit, karet, dan tebu. Tidak hanya itu saja, terdapat aset tetap non tanaman berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin & instalasi pembibitan, peralatan pabrik, kendaraan dan alat pengangkutan, infrastruktur aset tetap, alat pertanian, dan

inventaris kecil kantor. Sedangkan PT Alkindo Naratama Tbk masuk subsektor barang baku industri wadah dan kemasan. Aset tetap yang dimiliki berupa tanah, bangunan, perabot & peralatan kantor, kendaraan, mesin dan peralatan pabrik. PT Alkindo Naratama Tbk berfokus pada industri pengolahan kertas khususnya *packaging* serta pemasaran dan penjualan hasil industri baik lokal maupun ekspor.

Meskipun dari kedua perusahaan diatas memiliki subsektor yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam industri yang kepemilikan aset tetap perusahaan yang besar, memiliki badan hukum yang sah, dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Namun dari adanya kesamaan diatas terdapat sisi pembedanya, yakni PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) tidak melakukan penawaran umum perdana saham dan tidak memperdagangkan sahamnya ke publik, sedangkan pada PT Alkindo Naratama Tbk melakukan penawaran saham di Bursa Efek Indonesia. Kedua perusahaan juga memberikan informasi kinerja keuangan yang memungkinkan khalayak umum mengakses laporan keuangannya, sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan laporan keuangan dan informasi perusahaan terkait penerapan PSAK 216 aset tetap. Dengan adanya perubahan peraturan pada elemen biaya perolehan aset tetap menimbulkan pencatatan pendapatan dan biaya secara terpisah, terutama jika aktivitas pengujian menghasilkan banyak item, dan hasil penjualan aset tetap yang dihasilkan selama pengujian diakui sebagai pendapatan menimbulkan fluktuasi laba rugi jika nilai penjualan tersebut signifikan namun tidak berulang.

Aset tetap berdampak pada kinerja keuangan perusahaan terpaut hingga jangka panjang, maka dari itu terdapat saling berhubungan antara pengadaan aset tetap membutuhkan perencanaan yang matang. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa aset tetap bisa dianggap harapan entitas dalam kelancaran operasional aset yang digunakan, sehingga entitas memperoleh laba dan tingkat kinerja sangat baik. Menurut Safi'i & Fahriani., (2023) ketika memperoleh aset hingga diterapkannya pelepasan atau penghapusan sudah masuk dalam perhitungan dan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap. Dengan demikian seorang pihak perusahaan perlu menyesuaikan terkait kebijakan aset tetap yang berlandaskan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

PT Perkebunan Nusantara 1 (PERSERO) karena dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lonita et al., (2022) dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2021-2022 menunjukan adanya ketidaksesuaian dalam penyajian aset tetap pada indikator pengakuan aset tetap yang mencantumkan aset Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dalam aset tetap. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 216 paragraf 07. Hal ini disebabkan biaya Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) tidak dapat diukur secara andal, karena terdapat ketidakpastian kemampuan tanaman untuk menghasilkan dimasa depan. Selain itu penggunaan metode penyusutan yang kurang rasional, sebab PTPN 1 PERSERO menggunakan metode garis lurus pada aset tanaman menghasilkan atau (TM). Sedangkan PSAK 216 paragraf 62 menjelaskan bahwa penggunaan metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang bersifat tetap dalam satu periode selama umur manfaat aset, apabila nilai residu tidak berubah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan memilih PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dengan menggunakan laporan keuangan tahun 2022 – 2023 dan menggunakan semua indikator kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap PSAK 216. Selain itu peneliti juga menambah subjek penelitian yakni pada PT Alkindo Naratama Tbk yang masih dalam status pengembangan pada website Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu PT Alkindo Naratama Tbk menyajikan informasi penerapan amandemen PSAK 216 yang kurang lengkap karena ditahun 2022 hingga 2023 mengungkapkan adanya kegiatan kontruksi aset tetap berupa mesin, namun tidak memberikan informasi yang rinci terkait pengujian aset tetap. Sedikitnya penelitian terkait amandemen PSAK 216 sebab ketetapannya baru mulai berlaku efektif di bulan januari 2023. Selain itu aset tetap juga memiliki peran yang besar pada suatu perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dampak yang ditimbulkan sebab penerapan amandemen PSAK 216.

Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi terhadap dampak perubahan pada sisi kesesuaian dan laporan keuangan penerapan adanya amandemen PSAK 216 dan sisi kepatuhan atas kesesuaian terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian, penyajian aset tetap yang ada di laporan keuangan berdasarkan PSAK 216. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Dampak Penggunaan Amandemen PSAK 216 dan Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap Terhadap PSAK 216 pada PT. Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT. Alkindo Naratama Tbk. Tahun 2022 -**

2023”, dengan harapan dapat bermanfaat saat menyajikan laporan keuangan terkait aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 216.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak penerapan amandemen PSAK 216 perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk?
- 2) Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 pada perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut merupakan tujuan dari penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penerapan amandemen PSAK 216 perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk.

1.3.2 Manfaat

Berikut manfaat bagi pihak-pihak terkait yang diharapkan oleh penelitian ini, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan oleh peneliti diatas.

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Keilmuan

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur terkait dampak penggunaan amandemen PSAK 216 dalam menyusun hingga menganalisis laporan keuangan dan menambah pemahaman terkait kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 pada dua perusahaan dengan subsektor yang berbeda.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat dari penelitian ini dijadikan sumber informasi bahkan referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk mempermudah dan memperluas pengembangan ilmu mengenai dampak amandemen PSAK 216 dan kesesuaian penerapan akuntansi terhadap PSAK 216.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI)

Melalui penelitian ini dapat memberikan bukti mengenai efektivitas dan relevansi amandemen PSAK 216 dalam praktik

akuntansi di Indonesia, bahan masukan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan jika ditemukan adanya kelemahan atau kekurangan dalam PSAK 216 sebelum maupun setelah amandemen maka hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan standar.

b. Bagi Investor

Memberikan informasi terkait amandemen PSAK 216 berupa perubahan pengukuran setelah pengakuan dan pengungkapan pada elemen biaya perolehan aset tetap yang dimiliki perusahaan. Selain itu kesesuaian penerapan akuntansi terhadap PSAK 216 pada PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) dan PT Alkindo Naratama Tbk, dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi yang lebih transparan mengenai aset tetap perusahaan yang menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kinerja baik buruknya pengelolaan aset tetap.

c. Bagi Manajemen Perusahaan

Penerapan PSAK 216 yang konsisten memastikan laporan keuangan perusahaan sudah diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pemahaman potensi resiko terkait aset tetap, manajemen perusahaan dapat melakukan tahapan mitigasi



resiko seperti melakukan asuransi atau melakukan penilaian ulang terhadap nilai wajar aset.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO)

Variabel Penelitian	Kategori/ Indikator	Kesimpulan
Dampak penggunaan amandemen PSAK 216	Paragraf 17(e), 20A, dan 74A	PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) belum sepenuhnya sesuai dan tidak berdampak signifikan pada laporan laba rugi khususnya terhadap akun pendapatan dan beban dengan adanya amandemen PSAK 216 aset tetap. Hasil persentase sebesar 43,85% dari tujuh kriteria indikator hanya ada tiga indikator yang sesuai.
Kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap	a. Kesesuaian dalam perolehan aset tetap	Perusahaan memberikan informasi terkait perolehan aset tetap dan menggolongkan sesuai dengan sifat dan menyajikan biaya perolehan aset tetap sesuai dengan PSAK 216, sehingga persentase pada indikator perolehan aset tetap 100%.
	b. Kesesuaian dalam pengakuan aset tetap	PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) sesuai dengan ketentuan pedoman pada PSAK 216 dan didapatkan persentase sebesar 75%. Meskipun perusahaan tidak menyediakan informasi biaya perawatan sehari-hari terutama pada tenaga kerja dan bahan habis pakai.
	c. Kesesuaian dalam	PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) sesuai dengan

	pengukuran aset tetap saat pengakuan	persentase 62,5%, akan tetapi perusahaan tidak mengungkapkan dua ketetapan dari tiga ketetapan yang menjadi isi dari PSAK 216 paragraf 16.
	d. Kesesuaian dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan	PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) memberikan informasi dan menerapkan pengukuran aset tetap setelah pengakuan sesuai dengan peraturan atau ketetapan PSAK 216. Dengan demikian persentase pada indikator pengukuran aset tetap setelah pengakuan 100%.
	e. Kesesuaian dalam penyusutan aset tetap	PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) telah sesuai dengan peraturan atau ketetapan PSAK 216 dengan menerapkan paragraf 48, paragraf 58, dan paragraf 62, sehingga persentase penilaian pada indikator penyusutan aset tetap sebesar 100%.
	f. Kesesuaian dalam penghentian dan pelepasan aset tetap	Penghentian atau pelepasan aset tetap yang diterapkan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) mendapatkan total persentase 66,6% sebab terdapat pelepasan aset namun tidak diungkapkan secara jelas aset mana yang mengalami penghentian ataupun pelepasan. Maka dari itu PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) masih tergolong sesuai dengan PSAK 216.
	g. Kesesuaian dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap	Penyajian dan pengungkapan aset tetap PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) memperoleh 83,3% yang tergolong sesuai dengan PSAK 216, namun perusahaan harus melakukan perbaikan pada satu indikator yang tidak sesuai yaitu tidak adanya informasi yang rinci terkait penerapan PSAK 216.
	Ketujuh indikator kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216, PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) mendapatkan persentase 100% hanya tiga	

	indikator, yaitu perolehan aset tetap, pengukuran aset tetap setelah pengakuan, dan penyusutan aset tetap. Sedangkan pada indikator pengakuan, pengukuran saat pengakuan, penghentian & pelepasan, dan penyajian & pengungkapan perlu diperbaiki terkait penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216.
--	--

Sumber: Data diolah, 2024

B. PT Alkindo Naratama Tbk

Variabel Penelitian	Kategori/ Indikator	Kesimpulan
Dampak penggunaan amandemen PSAK 216	Paragraf 17(e), 20A, dan 74A	PT Alkindo Naratama Tbk belum sepenuhnya sesuai dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah pendapatan ataupun laba yang dilaporkan di laba rugi periode berjalan atau sebelumnya dengan adanya amandemen PSAK 216 aset tetap. Hasil persentase sebesar 43,85% dari tujuh kriteria indikator hanya ada tiga indikator yang sesuai.
Kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap	a. Kesesuaian dalam perolehan aset tetap	Penyajian informasi dan perhitungan biaya perolehan aset tetap sesuai dengan penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 216 dan menghasilkan total persentase 100% pada indikator perolehan aset tetap.
	b. Kesesuaian dalam pengakuan aset tetap	Indikator pengungkapan aset tetap PT Alkindo Naratama Tbk tidak sesuai dengan PSAK 216 dengan besar persentase 25%, yang disebabkan kurang lengkapnya informasi.
	c. Kesesuaian dalam pengukuran aset tetap saat pengakuan	PT Alkindo Naratama Tbk menghasilkan persentase menengah yakni 50%. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Alkindo Naratama Tbk hanya memenuhi sebagian besar kriteria indikator kesesuaian pengukuran aset tetap saat pengakuan sesuai dengan penerapan akuntansi aset

		tetap. Dengan demikian perusahaan harus meninjau dan memperbaiki kembali dari kriteria yang tidak sesuai.
d. Kesesuaian dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan		Penerapan akuntansi pada indikator pengukuran aset tetap setelah pengakuan PT Alkindo Naratama Tbk mendapat persentase pada 66,6%. Hal ini karena PT Alkindo Naratama Tbk tidak menerapkan revaluasi, sehingga tidak begitu mempengaruhi kesesuaian sebab telah menerapkan PSAK 216 paragraf 30.
e. Kesesuaian dalam penyusutan aset tetap		PT Alkindo Naratama Tbk sesuai dengan PSAK 216 pada indikator penyusutan aset tetap, dengan menyajikan informasi pada catatan atas laporan keuangan dan sudah menerapkan paragraf 48, paragraf 58, dan paragraf 62, sehingga persentase penilaian pada indikator penyusutan aset tetap sebesar 100%.
f. Kesesuaian dalam penghentian dan pelepasan aset tetap		Penghentian atau pelepasan aset tetap yang diterapkan PT Alkindo Naratama Tbk sesuai dengan PSAK dengan menerapkan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK 216 paragraf 67 dan paragraf 71, namun terdapat satu indikator penilaian yang tidak diungkapkan secara jelas aset mana yang mengalami penghentian ataupun pelepasan. Oleh karena itu didapatkan total persentase sebesar 66,6%.
g. Kesesuaian dalam penyajian dan pengungkapan aset tetap		Persentase indikator penyajian dan pengungkapan aset tetap sebesar 83,5%. PT Alkindo Naratama Tbk sesuai dengan PSAK 216, meskipun perusahaan harus melakukan perbaikan pada satu indikator yang tidak sesuai yaitu tidak adanya informasi yang rinci terkait penerapan PSAK 216.
Ketujuh indikator kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216, PT Alkindo Naratama Tbk		

	hanya dua indikator yang diungkapkan secara jelas pada annual report maupun laporan keuangan, yaitu perolehan aset tetap dan penyusutan aset tetap saja yang menghasilkan kesesuaian persentase 100% . Sedangkan pada indikator pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian & pelepasan, dan penyajian & pengungkapan perlu diperbaiki kembali terkait penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216.
--	--

Sumber: Data diolah, 2024

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif dengan pengambilan data sekunder baik melalui website resmi perusahaan maupun website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga peneliti hanya berpedoman dengan apa yang disajikan pada annual report maupun laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan dan tidak melakukan wawancara secara tatap muka. Dengan itu dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan data yang diperoleh.

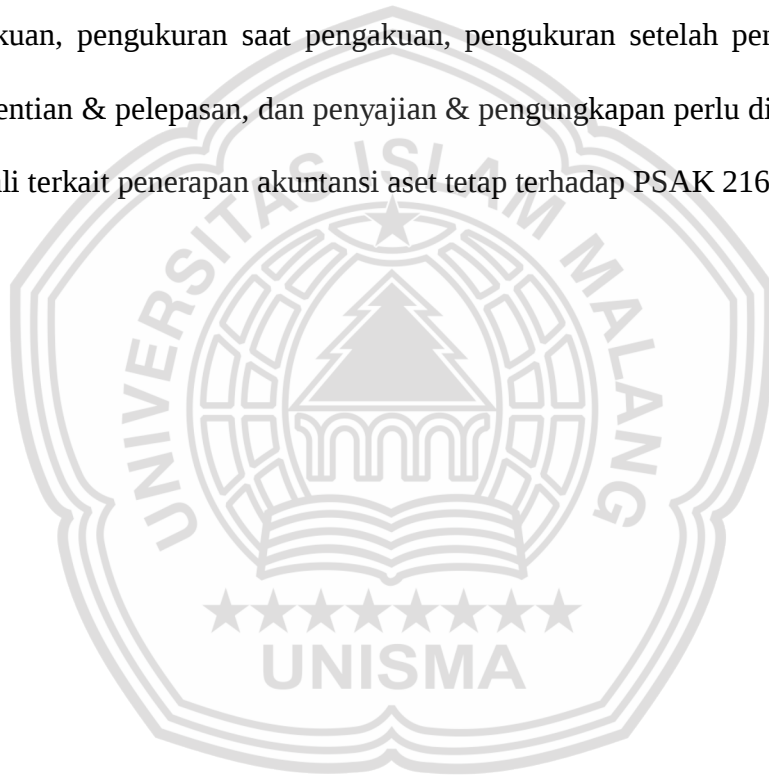
5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bagi peneliti selanjutnya disarankan ketika melakukan pengambilan data dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung kepada staff *accounting* ataupun manajer perusahaan, agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih akurat dan berkualitas.
- Bagi perusahaan PT Perkebunan Nusantara I (PERSERO) disarankan untuk melakukan peninjauan dan perbaikan atas penyajian aset tetap terhadap

amandemen PSAK 216 dan kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada indikator pengakuan, pengukuran saat pengakuan, penghentian & pelepasan, dan penyajian & pengungkapan perlu diperbaiki terkait penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216.

- c. Bagi perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk dan terhadap kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216 pada indikator pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian & pelepasan, dan penyajian & pengungkapan perlu diperbaiki kembali terkait penerapan akuntansi aset tetap terhadap PSAK 216.



DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*). *Jurnal Analisis Isi*, 5(9).
- Aprilia, N. W., Tinangon, J. J., & Pinatik, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Kaltim Kariangau Terminal. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 18(3).
- Ayuningtyas, N. G. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada PT Blue Bird Tbk Berdasarkan PSAK 16. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1347>
- Azizah, Aulia, Parwati, E. K. P. (2024). Analisis Penerapan PSAK 16 tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Rimba : Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/rimba.v2i1.524>
- Bakri, B. B. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada PT PLN (PERSERO) Wilayah Sulsel, Sultra Dan Sulbar Area Makassar Selatan. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 4(1). <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1894>
- Darwati, Lilis, F. (2022). Analisis Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna Aplikasi OVO Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (EUCS). *Just It: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 12(2).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2023). *Amandemen PSAK 16 Aset Tetap Hasil Sebelum Pengguna Yang Diintensikan*.
- Dhandy, Satria, E. S. (2023). Faktor-faktor Penentu Penilaian Kembali Aset Tetap Untuk Meningkatkan Arus Kas Dan Posisi Pasar. *Trilogi Accounting and Business Research*, Vol. 04, 121–131.
- Emir, & Laeli. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.18080>
- Harahap, M. A., & Siregar, S. (2022). Perkembangan Teori Akuntansi: Tinjauan Literature Terpilih. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- IAI Global. (2022). *Ikatan Akuntan Indonesia Global*. 1, 1–3. iaiglobal.or.id
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *PSAK Umum*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/pengesahan-amendemen-psak-16-aset-tetap-tentang-hasil-sebelum-penggunaan-yang-diintensikan>

- Inge Tasya Lonita, Junita, A., & Azhar, I. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Perkebunan Nusantara I (PERSERO) Langsa. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 3(6). <https://doi.org/10.33059/jmas.v3i6.6642>
- International, & Accounting Standards Committee. (2020). *IAS 16 Property, Plant and Equipment*.
- Kusuma. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah (Studi Empiris Pada RSUD Ratu Zalecha Martapura). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 10.
- Larasati, L. P. A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2024). Pengaruh Financial Distress dan Return On Assets (ROA) terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 13, 442–451.
- Lodan, Herdi, & Sanga. (2023). Analisis Perbandingan Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Dengan Peraturan Perpajakan Pada PDAM Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.2054>
- Maryanto, B., Sukhoco, A. Y., & Lanvino, F. (2024). Pengembangan Model Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap. *Media Informatika*, 22(3). <https://doi.org/10.37595/mediainfo.v22i3.212>
- Murdana, Alexander, S. W. L., & Mawikere, M. (2023). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Pada PT Buana Finance Tbk Cabang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, Vol. 6, 1147–1156.
- Nasution, M. P. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Ningsih, P. T. S., & Utami, S. N. (2021). Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penyusutan, Penilaian dan Pelaporan Aktiva Peralatan Menurut PSAK No. 16 Pada PT. Indah Nugraha Bakti. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.37012/ileka.v2i1.489>
- Palupi, A., Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Pengaruh Leverage, Proporsi Komisaris Independen, dan Auditor Switching Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02).
- Purnama, Y., Sokibi, P., & Parman, S. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Menggunakan Metode *Straight Line* (Studi Kasus: SMK Samudra Nusantara Cirebon). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3599>

- Putra, Ma'ruf, A. L. A., & Bily, M. Y. A. (2024). Penerapan Psak No.16 Atas Aset Tetap Dan Hubungan Dengan Perhitungan Laba Pada PT Garuda Indonesia.Tbk. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 2, 47–53.
- Putri, I. A. K., Awwalin, I. N., & Syaipudin, L. (2024). Analisis Kepatuhan Perusahaan dalam Penerapan PSAK No 16 Akuntansi Aset Tetap pada CV Wijaya Kusuma Tulungagung. *Akuntansi Publik, Manajemen Dan Perbankan*, Vol. 1.
- Putri, S. E., & K, K. (2022). Analysis of PSAK 16 Accounting Implementation at BAPPEDA of North Sumatra Province. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 1(2). <https://doi.org/10.37676/jamdbd.v1i2.2276>
- Rahima. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi* (Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group (ed.); 1st ed.). Merdeka Kreasi Group.
- Ramdhan, S. P. . M. M. (2021). Metode Penelitian. In *Google Books*.
- Safi'i, M. I., & Fahriani, F. Z. (2023). Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK NO. 16 Pada PT Selecta. *Promosi (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 11(1). <https://doi.org/10.24127/pro.v11i1.7888>
- Safitri, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). Determinan Kepatuhan Pegawai Kantor Pemerintahan Balai Kota Malang Dalam Membayar Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 12, 1231–1242.
- Shafa, Syifa, Melvietha, Oktafiani, H. S. (2024). Analisis Pengakuan dan Pengukuran Aktiva Tetap Pada PT. Waskita Karya Pusat Jakarta. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, Vol.4, 234–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1606>
- Sitasari, N. W., & Esa, U. (2022). Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik. *Forum Ilmiah*, 19(1).
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier*. Volume 5.
- Syah, S. R., Merdekawaty, E. G., & Yunianto, R. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psak 16 Pada Pt Bumi Karsa Di Makassar. *Jurnal Economina*, 2(1). <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.300>
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1).
- Theressa, Henrikus, P. N. A. (2023). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Aset Tetap Pada Ksp Kopdittuke Jung. *Jurnal Accounting Unipa*, Volume 2.
- Warfield., D. E. K. J. J. W. T. D. (2014). *Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition*. In *John Wiley & Sons, Inc.* (Vol. 2, Issue 3).

- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Yusuf, A. A. (2017). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. In *Salemba Empat* (Vol. 1).
- Wibawani, V. P. S., & Putri, Reza Amelia, Anna, Ririn Qori Rahmawati, Via Panggiarti, E. K. (2024). Analisis Penerapan Psak No 16 Terhadap Perlakuan Aset Tetap (Studi PT Berkah Ela Pratama). *Jurnal Riset Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 2. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61132/maeswara.v1i6.333>
- Wijaya, A., & Salesti, J. (2022). Analisis Penerapan PSAK NO. 16 Tentang Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap (Studi PT. Graha Trisaka Industri). *Equilibiria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 9(2). <https://doi.org/10.33373/eq.v9i2.5232>
- Winasti. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Asset Misappropriation* (Pendekatan *Theory of Planned Behaviour*).
- Wuisang, S., Lonto, M., & Tala, O. (2023). Analisis Penerapan Psak 16 Tentang Asset Tetap Pada PT PLN (Persero) UPDK Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4090>

